

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Fredman, L.M., dalam Sutjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Howlett, M. dan M.Ramesh, 1995, *Studying Public: Policy Cycle and Policy Subsystem*, London: Oxford University Press.
- Huda, N., 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Kusumah, B., 2006, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Gramedia.
- Manan, B., *Politik Hukum Ekonomi Sepanjang Peraturan Perundang undangan Pemerintahan Daerah*.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi Offset.
- Martokusumo, S., 2019, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Kantor Statistik Kabupaten Pasaman Barat, *Pasaman Barat dalam Angka 2018*, Simpang Empat, 2019.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat., *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016- 2021*, Simpang Empat, 2016.
- Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*.
- Radisman dkk, 1985, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta, Ind-Hill.
- Raharjo, S., 1980, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Angkasa.
- Siahaan, M.P., 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sukanto, S. dkk, 1988, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.
- Martokusumo, S, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

B. Artikel, Makalah dan Seminar

Adegustara. F, Syufiarti, Fatimah Titin, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Artikel).

Dedy. K, *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah ; Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*, Makalah Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Tarmizi, 2013, *Analisa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, makalah hukum pajak

C. Undang-undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang PBHTB.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi izin Gangguan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan RSUD.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2016 Retribusi Pemeriksaan Haji Lanjutan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelkes JKN pada FKPT Puskesmas.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Hewan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Biaya Pematangan Hewan.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

D. Website

<https://syahrulfitra.wordpress.com/2014/05/15/peran-retribusi-daerah-dalam-pelaksanaan-otonomi-daerah/> diakses tanggal 03 februari 2016 pukul 22.15 WIB.

Mobile-friendly, Rabu 30 Desember 2015 <http://m.jpn.com>>read>2015/12/30 diakses pada tanggal 6 Maret 2016 jam 22.41 wib.

Potensi Kabupaten Pasaman Barat. <http://www.pasamanbaratkab.go.id>. diakses pada tanggal 23 April 2014, jam 19.00 2014.